

Sekjen Golkar Minta Maaf Bilang PDIP 'Bentrok' Akibat Survei Ganjar & Puan

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengklarifikasi ucapannya soal bentrok di PDI Perjuangan usai Ganjar Pranowo menggulingi Puan Maharani di survei. Lodewijk menyebut apa yang diucapkannya berbeda maksud.

"Saya jelaskan, bahwa permasalahannya bukan begitu. Dan saya sampaikan sebenarnya betapa jahatnya hasil survei itu bagi internal partai," kata Lodewijk didampingi Ketua Golkar Sumut Musa Rajekshah saat menggelar konferensi pers di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat (23/12).

Lodewijk mengaku telah ditanyai berbagai pihak atas pernyataan tersebut. Dia pun

telah menyampaikan soal itu kepada Puan Maharani, Hastu, Utu, serta lainnya.

"Dan yang menanyakan kepada saya adalah Pak (Jumart) Girsang dapi dari Medan ini, kebetulan dari Komisi III dan saya kenal dekat. Saya jelaskan permasalahannya bukan begitu," sebutnya.

Di samping itu, persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto serta lainnya.

"Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada PDIP atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mungkin apakah itu dipelembatkan penjelasan saya tentang hasil survei, sekali lagi saya mohon maaf," katanya. ● me

Terbitkan Second Home Visa, Imigrasi: Hanya untuk WNA Premium

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan *Second Home Visa* yang ditujukan bagi Warga Negara Asing (WNA) premium atau kategori ekonomi menengah ke atas yang tertarik dan akan tinggal di Indonesia.

Dengan demikian, WNA lain tidak perlu ketakutan akan terusir dan tidak bisa tinggal lagi di Indonesia karena terbitnya pemberlakuan *Second Home Visa*.

Sub koordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, para WNA yang ada di Indonesia masih bisa tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, berwisata, berbisnis, berinvestasi, maupun bekerja, dengan izin tinggal yang berlaku.

"Terkait *Second Home Visa*, kami tegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan sektor properti dengan menggaet orang asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia," kata Achmad dalam siaran pers, Jumat (23/12).

Achmad mengatakan, *Second Home Visa* diterbitkan dengan syarat WNA memiliki kemampuan finansial atau bukti dana (*proof of fund*) sebesar Rp 2 miliar.

Persyaratan *proof of fund* sebesar Rp 2 miliar ini mungkin akan terasa berat bagi orang asing biasa, namun tidak menjadi masalah bagi orang asing dengan kelas ekonomi menengah ke atas.

Ya yakin bahwa kebijakan ini mampu menarik orang asing berkantong tebal untuk tinggal di In-

donesia lebih lama, yaitu 5 atau 10 tahun.

Sementara itu, terkait para wisman lansia, Achmad mempersilakan mereka tetap tinggal dengan Izin Tinggal Wisman Lansia yang masih berlaku dan tetap bisa tinggal sampai diterbitkan aturan lebih lanjut yang mengatur lebih rinci.

"Market kami sangat jelas, yaitu menasar orang asing yang mampu memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di *Second Home Visa*. Bagi Wisman Lansia yang banyak tinggal di Pulau Dewata Bali juga kami persilakan tetap tinggal di Indonesia menikmati masa pensiun di sini dengan ITAS lansia yang masih berlaku," ujarnya.

Di sisi lain, Achmad berharap kebijakan ini mampu mendorong peningkatan ekonomi dan bisnis serta investasi di Indonesia. Iya menyebut regulasi *Second Home Visa* sebagai "jalan tol" yang memberi kemudahan masuknya orang asing elite yang akan berbisnis, berinvestasi, berwisata, dan berkegiatan di Indonesia.

"Kami yakin para elite internasional akan *spend money* (menghabiskan uang) di sini. Dan hal ini jelas menjadi keuntungan bagi kita dengan pemasukan devisa yang bisa membantu peningkatan ekonomi negara kita," sebut Achmad.

Sebagai informasi, pemberlakuan *Second Home Visa* telah direvisi oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly di Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Rabu (20/12). ● me

Parpol Tak Lolos Desak Hentikan Tahapan Pemilu, Ini Kata KPU

JAKARTA (IM) - Sejumlah partai politik tak lolos Pemilu 2024 yang tergabung dalam "Gerakan Melawan Political Genocide" mendesak tahapan Pemilu 2024 dihentikan karena merasa dicurangi.

Komis Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu hanya dapat dihentikan atau ditunda karena gangguan eksternal. UU Pemilu hanya mengenal istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

"Pemilu lanjutan dapat dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Holik, kepada wartawan, Jumat (23/12).

"Pelaksanaan pemilu lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang terhenti. Hal ini diatur dalam Pasal 431 ayat 1 dan 2 UU Pemilu," katanya menambahkan.

Sementara itu, pemilu susulan diselenggarakan jika sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.

"Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 432 ayat 1 dan 2 UU

Pemilu," katanya.

Gerakan ini mayoritas berisi partai-partai yang tidak lolos tahap pendaftaran 15 Agustus 2022, yakni Partai Masyumi, Perkasa, Pandai, Kedaulatan, Reformasi, Pemersatu Bangsa, dan Berkarya, serta Partai Republik Satu dan PRIMA yang tak lolos verifikasi administrasi 14 Oktober 2022.

Secara spesifik, gerakan ini mempersoalkan tidak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tak lolos tahap pendaftaran. Walaupun Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 memang mengatur demikian, mereka menilai hal ini menghambat mereka mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, karena objek sengketa harus berupa keputusan atau berita acara yang diterbitkan KPU.

Selain PRIMA dan Republik Satu, partai-partai dalam gerakan ini akhirnya menggugat KPU RI lewat jalur gugatan pelanggaran administrasi. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan gugatan mereka tak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga mereka tetap tak lolos pemilu.

Secara spesifik, Yani es menyinggung nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang kendati tak lolos verifikasi faktual. Kesempatan itu diperoleh Partai Ummat setelah mencapai sepakat dengan KPU RI dalam forum mediasi di Bawaslu RI, sebuah forum yang digelar sebagai salah satu tahapan penyelesaian sengketa. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN MENHAN

PRABOWO DI INDRAMAYU

Menhan Prabowo Subianto (kedua kanan) berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan di kampung nelayan Karangong, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (23/12). Dalam kunjungan tersebut Menhan memberikan bantuan sepeda motor sebanyak 20 unit untuk prajurit TNI Kodim 0616/Indramayu dan 1.000 paket sembako bagi warga di kampung nelayan.

Menanti Sejarah Baru Terukir, KSAL Pilihan Jokowi dari Korps Marinir?

Saat ini di TNI AL ada 9 orang berpangkat Laksamana Madya, salah satunya dari Korps Marinir, yaitu Irlen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswanto.

JAKARTA (IM) - Tekateki siapa yang menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) masih menjadi misteri. Beredar sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai suksesor Yudo Margono sebagai KSAL.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pengganti dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif (penunjukan KSAL)," kata Yudo kepada wartawan di Istana Presiden, beberapa

waktu lalu.

Yudo menegaskan, bahwa posisi KSAL nanti bukan dari bintang 1 maupun 2. Selain itu, yang pasti KSAL berasal dari Angkatan Laut.

"Sudah dijelaskan yang jelas bukan bintang 1, bukan bintang 2, yang jelas dari Angkatan Laut," ucap Yudo.

Di sisi lain, Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) idealnya, pernah menjabat komandan kapal yang merupakan satuan pemukul.

"Misalnya, fregat, korvet, kapal selam maupun Kapal

Cepat Rudal (KCR) dan pernah memimpin komando armada," kata Fahmi dilansir Antara.

Hal itu, lanjut dia, KSAL adalah peminat kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi laut, baik yang bersifat operasi tempur maupun operasi keamanan.

Dengan demikian seorang KSAL harus memahami dan memiliki pengalaman yang memadai untuk menyiapkan dan mengintegrasikan operasi laut yang terdiri dari operasi permukaan, bawah permukaan, operasi udara dan operasi pendaratan.

"Kriteria ini dimiliki oleh perwira korps pelaut, terutama yang pernah menjabat komandan kapal satuan pemukul dan panglima komando armada," tutur Fahmi.

Jika bicara peluang, lanjut dia, tentu saja semuanya kembali pada hak prerogatif Pre-

siden, sebagai penentu siapa yang dianggap paling layak, paling sesuai kebutuhan TNI dan sekaligus cocok dengan keinginan Presiden.

"Namun tentu saja kita harus tetap mengingat bahwa usia, masa aktif, durasi kepemimpinan dan regenerasi juga merupakan aspek penting yang tak boleh luput dari pertimbangan. Penting bagi pejabat KSAL nantinya untuk memiliki ruang dan waktu yang lebih longgar dalam menjalankan agenda-agendanya yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI AL ke depan," paparnya.

Dia menambahkan, pengisian jabatan KSAL bukanlah sekadar kebutuhan mengisi kekosongan semata.

"Melainkan juga merupakan bagian dari pembinaan karier personel, apresiasi prestasi, peyegaran dan pemantapan organisasi," pungkasnya.

Setidaknya ada 9 nama perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya yang berpotensi menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Diantaranya datang dari Korps Marinir, yaitu Irlen TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswanto (AAL 1987) dan Komandan Kodiklat Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono (AAL 1988).

Bambang Suswanto dan

Suhartono sama-sama pernah tercatat sebagai Komandan Paspampres di era Presiden Joko Widodo.

Sementara itu yang lainnya adalah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro (AAL 1987) dengan sisa usia pensiun normatif 3 bulan; Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia (AAL 1987) dengan sisa usia pensiun normatif 8 bulan; Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 11 bulan; Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 11 bulan.

Selain itu, Komandan Pus-hidroal Laksamana Madya TNI Nurhidayat (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 13 bulan; Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 16 bulan; Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali (AAL 1989) dengan sisa usia pensiun normatif lebih dari 24 bulan.

Selanjutnya, Herru Kusmanto dan Muhammad Ali tercatat pernah bertugas sebagai ajudan Wakil Presiden Boediono. Sedangkan Amarulla Octavian pernah menjabat posisi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ● han

NasDem: AHY, Aher, dan Andika Perkasa akan Dipertimbangkan Menjadi Cawapres

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie mengungkapkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), hingga eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa bakal dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Koalisi Perubahan.

Hingga saat ini, belum ada titik terang dari Koalisi Perubahan mengenai siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Semua masukan untuk kemenangan diapresiasi. Nama-nama yang muncul seperti AHY, Aher, Andika, Khofifah (Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur), Yeni Wahid, semua dipertimbangkan secara saksama dan baik-baik," ujar Effendi saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/12).

Effendi menekankan, siapa pun cawapresnya nanti,

semua sudah atas kesepakatan bersama antara NasDem, Demokrat, dan PKS. Dia menyebut tidak ada istilah tinggal meninggal dalam Koalisi Perubahan ini.

"Semua bersepakat untuk kemenangan. Siapa pun cawapresnya adalah untuk mendorong suara demi kemenangan," tuturnya.

Maka dari itu, baik NasDem, Demokrat, dan PKS dipersilakan untuk mengusulkan nama cawapres masing-masing ke Koalisi Perubahan. Effendi mengatakan, nama-nama yang ada akan dibahas secara bersama. Kemudian, pada akhirnya, sosok cawapres itu akan diputuskan secara bersama pula.

"Semua yang diusulkan masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Satu dari mereka siapa yang paling kuat, yang paling bisa mendorong suara, yang bisa mengisi kekurangan Anies, itulah yang akan dipilih jadi cawapres," imbuh Effendi.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya

mengatakan bahwa partainya membuka pintu untuk bergabungnya Jenderal Andika Perkasa usai purna tugas sebagai Panglima TNI. Willy bahkan mengatakan, Andika memiliki tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

"Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka," kata Willy saat dihubungi, Selasa (20/12).

Willy melanjutkan, NasDem akan menindaklanjuti kesempatan tersebut. Caranya, dengan mengajak berkomunikasi saksinya Andika membahas politik pada awal tahun depan.

"Habis inilah, mungkin ya habis tahun baru lah nanti bagaimana obrol dengan Pak Andika," ucap Willy.

"Ya salaturahmi," tambahnya.

Namun demikian, Willy tak menjelaskan ketika ditanya kemungkinan pertemuan NasDem dengan Andika itu terkait pencalonan presiden untuk Pemilu 2024. ● me

KPK Selidik Barang Bukti Hasil Geledah di DPRD hingga Kantor Gubernur Jatim

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelisik lebih dalam ihwal dokumen hingga uang tunai yang berhasil diamankan usai menggeledah Gedung DPRD hingga Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim. Baruk tersebut bakal didalami penyidik lewat para saksi.

KPK bakal segera memanggil para saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah Pemprov Jatim untuk mengklarifikasi hasil penggeledahan tersebut. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara detil dari ruang mana saja dokumen dan uang tunai itu diamankan.

"Detail barang ataupun dokumen yang diamankan darimana dan siapa saja saat geledah tentu tidak bisa kami sampaikan karena masih akan dikonfirmasi pada saat pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (23/12).

Sebelumnya, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Gedung DPRD hingga Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) sejak tiga hari kemarin, mulai 19 hingga 21 Desember 2022. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah Pemprov Jatim.

Hasil penggeledahan di sejumlah lokasi Gedung DPRD Jatim, KPK mengamankan beberapa dokumen dan uang tunai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan untuk penggeledahan beberapa lokasi di lingkungan Kantor Gubernur dan Wagub

Jatim, KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik.

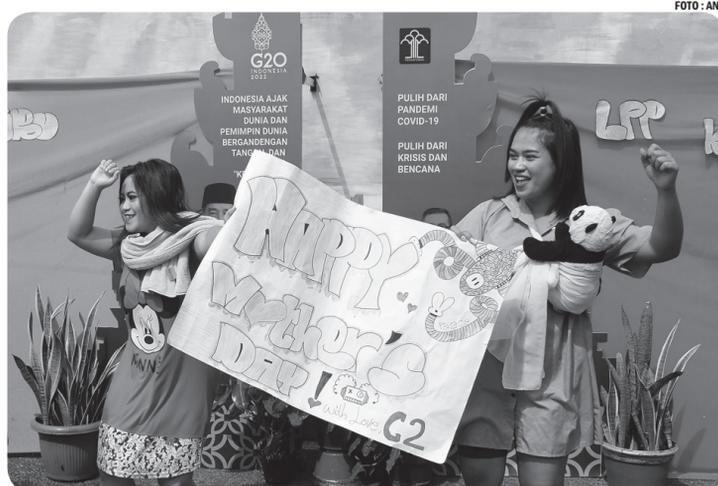
Kendati demikian, belum diketahui dengan pasti dari ruang mana saja dokumen dan uang tunai tersebut diamankan. KPK bakal membeberkan secara detil setelah adanya pemeriksaan para saksi. Sebab, hasil temuan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke para saksi.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelung, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid (AH); serta Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eng.

Sahat Simanjuntak diduga telah menerima uang senilai Rp5 miliar terkait pengurusan alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun, uang suap tersebut berasal dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang merupakan Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Uang suap tersebut diterima Sahat melalui orang kepercayaan, Rusdi. Diduga, Sahat telah menerima suap terkait pengurusan alokasi dana hibah Jatim tersebut sejak 2021. Saat ini, KPK sedang mendalami aliran dana penggunaan uang suap tersebut. ● han



PERINGATAN HARI IBU DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN BALI Warga binaan membawa poster bertuliskan "Happy Mother's Day" saat memperingati Hari Ibu di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (23/12). Sebanyak 230 warga binaan perempuan di lapas tersebut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan Hari Ibu untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kebersamaan.